

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU) DI KELURAHAN PESISIR KECAMATAN LIMAPULUH KOTA
PEKANBARU**

Oleh:

Hafidzita Eka Putri Irvan (1401121224)

hafidzita_ekaputriirvan@yahoo.com

Pembimbing: Mayarni, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The city without Slums programme (KOTAKU) is a program that funded nationally in 271 counties/cities in 34 provinces that became a collaboration platform or base of the handling of the slums that integrate various resources and funding sources , including those from the Central Government, provinces, counties or cities, donors, private, public, and other stakeholders. Coastal village is one of the implementing kotaku, goals of the research is to describe and analyse the forms of community participation. The methods used in this research was the qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results showed that this form of public participation was seen from public participation in decision making, participation in the implementation phase, the participation in the taking of benefits, and the participation of the community in stages of the evaluation. Based on the foregoing indicates that public participation is already there but not thorough all phases. Because there are still constraints that impede public participation ranging from low levels of public awareness, weak understanding of the people and the bustle of the community. Then it is necessary to approach the community so the community understands the purpose of the program that implemented and communication between stakeholders, community and village apparatus must be maintained so that there is no misunderstanding.

Keywords: Public Participation, Development, Community Empowerment, Program Cities Without Slums (KOTAKU)

Latar Belakang

Pembangunan merupakan konsep yang tersusun dan terencana secara sistematis, yang bertujuan untuk menciptakan suasana serta sistem baru. Sistem itulah yang kemudian akan memberikan kondisi bagi berkembangnya tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya

pembangunan maka ada juga pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat mempunyai dampak terhadap berbagai bidang diantaranya bidang lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang memerlukan ketersediaan prasarana dan sarana dasar yang secara umum akan bersifat susul

menyusul dengan lajunya ledakan pertumbuhan penduduk. Ledakan penduduk ini bisa menimbulkan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, terbentuknya permukiman kumuh sering dipandang sebagai potensial menimbulkan masalah perkotaan, masalah ini menjadi pembicaraan yang seolah tanpa akhir.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa: “*setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Untuk menangani fenomena perumahan dan permukiman kumuh maka dibutuhkan keterlibatan pemerintah didalamnya, keterlibatan pemerintah dengan cara membuat program kegiatan secara terpadu antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk didalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih bisa menggerakkan peran masyarakat dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka. Dengan ini diharapkan agar dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupan

bermasyarakat dan dapat membantu memberdayakan mereka.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang di laksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi yang menjadi “*platform kolaborasi*” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan program kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh yaitu tentu saja masyarakat, tokoh pemuda diwilayah, tokoh-tokoh masyarakat, dan kelompok peduli lainnya seperti LKM. Dalam pelaksanaannya masyarakat dimampukan untuk dapat berpartisipasi aktif dan bekerja bersama dengan pemerintahan kelurahan/desa, antar pemerintah kelurahan/desa dibawah koordinasi pemerintah kecamatan dan kelompok peduli dalam penetaan lingkungan permukimannya, masyarakat berhak dan bertanggung jawab berpartisipasi dalam penataan permukimannya.

KOTAKU yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas permukiman kumuh pada tahun 2017, kelurahan-kelurahan di kecamatan limapuluh ikut berpartisipasi berjumlah tiga kelurahan, kelurahan pesisir salah satu kelurahan yang ikut turut berpartisipasi di wilayah Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Kelurahan Pesisir seluas 12.08 ha dan mendapat

penanganan kumuh melalui program kotaku, disebabkan karena dikawasan ini terdapat berbagai masalah dimana dikawasan Kecamatan Limapuluh merupakan kawasan pusat bisnis Kota Pekanbaru, dengan ada banyaknya hotel-hotel sebagai salah satu penunjang pergerakan bisnis.

Berkaitan dengan keadaan dan dana yang sudah diterima dikelurahan pesisir sudah digunakan untuk pembangunan sarana fisik seperti drainase dan jalan koral sikat, pembangunan di Kelurahan Pesisir hampir menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi dari beberapa pembangunan dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan Program KOTAKU.

Berdasarkan prariset pada tanggal 17 maret 2017 bersama Koordinator program di LKM Tunas Karya terdapat berbagai masalah yang timbul yang (1) kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai maksud program yang dilaksanakan dikawasan lingkungan sekitar rumahnya, mereka beranggapan program ini adalah proyek besar yang dikira masyarakat perangkat desa meminta jatah untuk melaksanakan program kotaku, (2) partisipasi yang kurang dari masyarakat dalam menghadiri musyawarah. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat membuat partisipasi mereka sangat belum memadai. Dengan pendidikan yang rendah, mereka tidak mengerti dan sangat sulit memahami alur prosedur dari program yang dilaksanakan dan juga kurangnya komunikasi antar pihak - pihak yang terkait kepada masyarakat akan penting dan tujuan dari program ini.

Dalam keadaan kemiskinan, dengan pendapatan mereka sehari-hari tidak menentu, menjadikan mereka sangat

sulit untuk mengambil keputusan mana yang harus dilakukan antara kepentingan perut atau kepentingan bersama, kemudian masyarakat ada yang tidak mau halamannya di ambil untuk perbaikan lebih baik itu yang menjadi hambatan dilapangan dalam pelaksanaan program kotaku dikelurahan pesisir, masyarakat hanya sebagai penerima keputusan dari setiap kegiatan yang direncanakan namun ada masyarakat yang berperan aktif dalam partisipasi seperti ikut menentukan lokasi kumuh yang ada disekitar wilayah kelurahan pesisir dengan cara mengisi formulir pengisian data. Oleh sebab itu partisipasi dari masyarakat menjadi sangat penting dalam mencapai suatu keberhasilan dan keberlanjutan program yang dijalankan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam pencapaian sasaran program kotaku, keberhasilan bukan semata - mata didasarkan pada kemampuan aparat pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program kotaku. Partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan kemampuan dan biaya dalam pencapaian pelaksanaan program

Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru ?

Konsep Teori

Menurut Siagian (2008:5) pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Demikian halnya dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (2011:51), partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program.

Kemudian terdapat beberapa bentuk (tahap) partisipasi diantaranya : partisipasi menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011:58), terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hunungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat

berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Cohen dan Uphoff menyatakan bahwa ilmuwan dan politikus lebih memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi. Sementara para administrator cenderung memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam rangka memperbaiki *well being* masyarakat. Hal tersebut memerhatikan adanya latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda akan menimbulkan konsep partisipasi yang berbeda pula.

Berdasarkan bentuk partisipasi dari beberapa ahli diatas, peneliti menggunakan bentuk partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, karena bentuk partisipasi sesuai dengan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam program Kotaku melalui tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil dan mengevaluasi program.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Limapuluh pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tunas Karya Kelurahan Pesisir Jalan Sultan Syarif Qasim No 60 dan Wilayah RT 04 RW 02 Gg. Tanjung Karang.

3. Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*). *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang bermula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Maka diputuskan

yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman
2. Tim Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh
3. Koordinator LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Tunas Karya Kelurahan Pesisir
4. Masyarakat
5. Ketua RW 02
6. Ketua RT 04 dan Sekretaris Ketua RT 04

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, baik melalui observasi maupun wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui data tertulis yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Diperoleh melalui hasil buku bacaan, dokumen-dokumen, buku peraturan perundang-undangan, skripsi serta bahan tertulis lainnya

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan Kartono (2013:143). pengamatan (observasi) ini dilakukan di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

b. Wawancara (*Interview*)

wawancara adalah situasi peran antarpribadi berhadapan muka (*face to face*), ketika seseorang (yakni pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancarai, atau informan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang di peroleh akan di bahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di tempat penelitian di laksanakan kemudian di bandingkan dengan konsep – konsep maupun teori – teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap penelitian ini dalam penelitian ini penulis melakukan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang

di peroleh waktu dan alat yang berbeda. Trianggulasi secara umum merupakan kegiatan *check, re-check* dan *crosscheck* antara materi atau data dengan observasi penelitian di lapangan yang selanjutnya hasil obsevasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi pribadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Partisipasi Masyarakat

Pertama Tahapan Pengambilan Keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat - rapat terhadap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Kedua Tahapan Pelaksanaan, yang merupakan tahapan terpenting dalam pembangunan sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.

Ketiga Tahapan Pengambilan Manfaat, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan maka semakin besar manfaat proyek yang dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasara. Keempat Tahapan Evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberikan masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

A. Tahapan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam

perencanaan yang maksudnya adalah keikutsertaan masyarakat untuk menghadiri musyawarah atau rapat - rapat yang diadakan oleh aparat kelurahan atau desa beserta pemangku program lainnya dalam rangka melakukan suatu pembangunan infrastruktur di Kelurahan Pesisir. dalam musyawarah tersebut diharapkan agar masyarakat bisa memberikan ide maupun saran sampai ketahap pengambilan keputusan agar hasil dari program yang dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi langkah awal yang sangat penting dan akan mempengaruhi langkah -langkah serta tahap - tahap berikutnya. Partisipasi dalam bentuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya untuk menilai sesuatu rancangan program yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian agar dapat lebih menumbuhkan rasa anggung jawab untuk ikut serta menentukan keberhasilan program, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai sesuatu keputusan atau kebijakan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan merupakan bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari haril wawancara dengan Ketua RW 12 dan Ketua RT 04 sebagai berikut :

“Biasanya masyarakat diikut dilibatkan dan dibawa dalam rapat atau musyawarah, di dalam rapat kami berembuk bersama dengan Ketua RW beserta bapak lurah disitulah kita memutuskan semuanya. Hanya saja kami mengundang beberapa perwakilan dari masyarakat saja” (Wawancara Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Pesisir, 2 November 2017)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dalam pengambilan keputusan kegiatan sebagian dari masyarakat sudah diundang dalam musyawarah, dengan tujuan agar rencana yang diharapkan dan pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang dianggap bisa bermanfaat dan dimanfaatkan secara bersama – sama.

Kemudian untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan dapat dilihat dari wawancara dengan beberapa masyarakat sebagai berikut :

“Saya sebagai masyarakat disini saya tidak pernah dengar program itu, cuman saja saya melihat ada baliho nya , tetapi sosialisasinya itu tidak ada cuman ditempel - tempel begitu saja baliho nya dan kita mesti membaca”(wawancara salah satu warga RT 04 Kelurahan Pesisir, 28 Oktober 2017)

Berdasarkan wawancara diatas masyarakat hanya membaca baliho yang terdapat diwilayah mereka, mereka ditidak mengetahui adanya program yang dilaksanakan ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemangku kepentingan dan aparat pemerintahan

B. Tahap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide - ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada kegiatan tersebut. Untuk itu partisipasi masyarakat kembali lagi sangat dibutuhkan dalam tahapan ini agar dapat menghasilkan keberhasilan

dari suatu program pembangunan, partisipasi masyarakat disini sangat dituntut lebih dalam segala hal, karena partisipasi didalam pelaksanaan pembangunan sangat berat, dimana masyarakat diharapkan agar mampu memberikan partisipasi sebesar mungkin karena dalam pelaksanaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih baik. pernyataan dari ketua RT 04 sebagai berikut :

“Tidak semua masyarakat dapat membantu dalam pelaksanaan tersebut dikarenakan memang masyarakat disini ada yang kerja buruh dan pegawai, disitu pula kita tidak bisa memaksa mereka untuk meminta bantunya.”(wawancara dengan pak RT 04, Kelurahan Pesisir , tanggal 2 November 2017)

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting mengingat masyarakat yang nantinya akan menggunakan hasil pembangunan tersebut, namun masyarakat tidak dapat dipaksakan untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan dikarenakan mereka mempunyai kesibukan yang sangat penting dalam mencari nafkah sehingga mereka susah untuk memilih mana yang lebih didahulukan.

Namun bagi masyarakat yang tidak ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan beralasan mempunyai kesibukan masing - masing dan tidak tahu masalah program pembangunan tersebut, mereka yang tidak ada waktu ikut berpartisipasi memberikan bantuan berupa makanan dan minuman yang dapat kita lihat hasil wawancara dari beberapa masyarakat sebagai berikut :

“Yang bisa saya lakukan hanya membuat mereka minum, belikan goreng - gorengan paling itu saja sih yang bisa saya berikan. Kalau ikut bekerja saya tidak bisa karena saya

sama suami saya harus buka kedai.”(Wawancara dengan salah satu masyarakat RT 04 RW 02, Kelurahan Pesisir, tanggal 02 November 2017)

Dari wawancara dengan beberapa masyarakat mereka yang tidak bisa berpartisipasi dengan tenaga mereka menyumbangkan makanan dalam kelasungan pelaksanaan tersebut. Kembali lagi dengan alasan mereka yang dikarenakan masih adanya pekerjaan lain yang lebih diutamakan oleh masyarakat yaitu mereka harus bekerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari - hari. Dari hasil wawancara bisa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih dibidang kurang, hal ini jelas menghambat atau memperlambat dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

untuk menentukan keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan di kelurahan Pesisir masyarakat diharapkan bisa agar kedepannya bisa untuk meningkatkan bentuk partisipasi didalam pelaksanaan pembangunan kedepannya baik berupa swadaya masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berlangsung atau tenaga didalam pelaksanaan pembangunan guna agar dapat menunjang kelancaran didalam pelaksanaan pembangunan, disebabkan berhasil atau tidaknya suatu proyek pembangunan di kelurahan Pesisir ini sangat ditentukan dari partisipasi masyarakatnya sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat di RT 04 RW 02 sepenuhnya.

C. Tahap Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat

Pada tahap ini masyarakat memperoleh hasil dari program Kotaku yang telah dibuat, tahap penerima hasil ini merupakan perwujudan dalam partisipasi, partisipasi pada tahap ini

dengan melibatkan masyarakat pada tahap pemanfaatan program Kotaku tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga untuk memelihara bangunan yang telah dibuat. Dan keikutsertaan masyarakat untuk menjaga, merawat serta memanfaatkan dengan sebaik mungkin dari hasil - hasil pembangunan yang telah dilakukan.

Pemanfaatan ini selain dilihat dari penikmatan hasil -hasil pembangunan, juga dilihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan hasil - hasil pembangunan yang menjadikan masyarakat dapat mandiri dan mampu untuk meningkatkan keberdayaan mereka dalam meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam hasil pembangunan dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan dapat dilihat dari wawancara dengan ketua RT 04 sebagai berikut :

“Masyarakat disini sudah menjaga bersama dengan cara bergotong royong, kalau ada sampah mereka sapu dan kalau hujan deras kemudian banjir mereka membersihkan perkarangan rumah mereka sesuai dengan kemampuan mereka.” (wawancara dengan pak RT 04 RW 02 Kelurahan Pesisir, tanggal 02 November 2017)

Hasil wawancara dengan pak RT 04 dapat diketahui bahwa telah adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk menjaga hasil dari pembangunan yang telah dikerjakan, partisipasi masyarakat ditahap ini sudah meningkat, dan menjaga sesuai dengan kemampuan mereka, tidak begitu susah dapat partisipasi ini untuk melaksanakannya, hanya dibutuhkan kesiapan dan

kemampuan dari masyarakat didalam memanfaatkan hasil - hasil dari pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki yang memungkinkan semua lapisan masyarakat dapat menikmati dan merasakan dampak dari hasil pembangunan yang dilakukan.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di RT 04 RW 02 ditinjau dari aspek partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dapat dilihat dari wawancara dengan beberapa masyarakat sebagai berikut :

“Manfaat yang dirasakan pertama kalau ada honda lewat bisa laju, karena sebelumnya jalan disini berlubang - lubang. Kedua kalau lagi hari panas kaki bisa dipijakkan dimanfaatkan untuk kesehatan ketika kaki sakit untuk terapi.”(wawancara dengan salah satu masyarakat RT 04 RW 02 Kelurahan Pesisir, tanggal 28 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga diatas dapat diketahui bahwa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat RT 04 RW 02 yaitu ketika ada kendaraan yang melintas dapat berjalan dengan lancar bahkan ada sebagian dari masyarakat memanfaatkan hasil jalan tersebut untuk terapi ketika kaki nya sakit, memanfaatkan hasil - hasil dari pembangunan yang telah dilakukan karena memang pembangunan yang dilakukan merupakan yang didasarkan kepada keinginan masyarakat dan kepentingan yang dampaknya akan langsung dapat dirasakan terhadap peningkatan dari kesejahteraan masyarakat nya sendiri.

Meskipun partisipasi disini tidak begitu memberatkan masyarakat akan tetapi partisipasi mesyarakat masih sangat diperlukan, dari program yang telah dilakukan, kesuksesan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat turut serta memanfaatkan hasil - hasil

pembangunan sesuai dengan kebutuhannya dan pembanguna yang dilakukan apakah mampu bertahan dan berkelanjutan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

Pada hakikatnya pembangunan memang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa merasakan atau menikmati hasil - hasil dari pembangunan yang dilakukan tanpa terkecuali bukan untuk sebagian masyarakat. Dan meskipun didalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan mungkin partisipasi masyarakat kurang dan sulit didapatkan, tetapi didalam pemanfaatan hasil pembangunan harus bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat.

D. Tahap Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam menilai atau mengevaluasi pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan partisipasi ini bertujuan juga apakah pelaksanaan program KOTAKU telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan rencana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ketua RT 02 sebagai berikut :

“Masalah ketika pembangunan digang sebelah sana tidak dibikin, cuman sampai digang sebelahnya dibikin .Gang nya jadi tidak bermanfaat. Dasarnya apa, dasarnya skip katanya. Kita kan bisa mengutamakan jalan yang ini. Bukan kita menyalahkan, memang program KOTAKU ini program yang bagus, saya akui bagus cuman ya itulah kendalanya masak tidak beres”(wawancara dengan

pak RT 04 RW 02 Kelurahan Pesisir, tanggal 02 November 2017)

Dari hasil wawancara dengan pak RT 04 terdapat kendala mengenai penetapan lokasi yang akan diperbaiki, disinilah diperlukannya partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan agar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan dapat dirasakan oleh semuanya.

Kemudian untuk itu evaluasi jika dikaitkan dengan pembangunan merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, karena kegiatan ini untuk mengetahui apakah pekerjaan atau pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana, untuk mengetahui nya dapat dilihat dari beberapa hasil dari wawancara dengan beberapa masyarakat sebagai berikut :

“Kalau udah hujan ni banjir, air nya langsung mengalir kesitu semuanya kebawah dengan deras, lacu airnya kalau turun. Kalau hujan ini, jalan ini penuh semuanya, pemerintah kalau mau atasi lah dulu parit - parit ini kalau bisa dibesarkan. Ada juga tu masyarakat yang tidak setuju dengan dibuatnya jalan itu karena banjir itulah mereka tidak mau. Kenapa banjir, jalan itu lebih tinggi dari pada rumah, jadi jatuh airnya kebawah itulah yang menyebabkan banjir .kemudian orang pemborongnya itu tidak dipikirkannya lokasi rumah seharusnya kalau bisa jangan terlalu tinggilah jalannya.”(wawancara dengan salah satu masyarakat RT 04 RW 02 Kelurahan Pesisir, tanggal 28 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara diatas tidak hanya hal yang positif dirasakan masyarakat namun hal negatif juga dirasakan oleh masyarakat setelah berlangsungnya pembangunan jalan koral

sikat tersebut, masyarakat mengeluh karena terlalu tingginya pembangunan jalan dari pada bangunan rumah mereka sehingga ketika hujan deras air langsung mengalir dengan cepatnya kebawah.

Dari itulah adanya tahap evaluasi ini dibuat agar mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam kegiatan pembangunan tersebut dan ketika ada kekurangan - kekurangan maka akan diperbaiki untuk kesempurnaannya. Seperti hal nya harapan dari beberapa masyarakat untuk dapat memperbaiki masalah yang terjadi dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat sebagai berikut :

“Kepengen saya lebih diratakan lagi, ini kan terlalu tinggi jalannya dan juga tidak rata cuman lihat dipinggirnya itu masih bolong - bolong, jadi kepengennya sih rata sampai kedepan dirapikan tertutuplah semuanya.”(wawancara dengan salah satu masyarakat RT 04 RW 02 Kelurahan Pesisir, tanggal 02 November 2017).

Masyarakat di wilayah Gang tanjung karang tersebut sangat berharap supaya kedepannya pembangunan yang akan dilaksanakan lagi pada tahun depan dapat berjalan semaksimal mungkin, sebab pembangunan menjadi salah satu kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

2. Faktor - faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh.

- a. **Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat.** Kesadaran masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting untuk mencapainya suatu keberhasilan yang diinginkan dan mensejahterakan masyarakat. Masyarakat dalam pembangunan

dituntut untuk agar dapat ikut dalam partisipasi, dari kesadaran masyarakat terhadap program yang dijalankan akan mempelancar pelaksanaan suatu proyek. Namun di Kelurahan Pesisir masih menjadi kendala, dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan Ketua LKM Tunas Karya Kelurahan Pesisir sebagai berikut :

“Kurangya pengetahuan dari masyarakat mengenai maksud program yang dilaksanakan dikawasan lingkungan sekitar rumahnya, mereka beranggapan program ini adalah proyek besar yang dikira masyarakat perangkat desa meminta jatah untuk melaksanakan program kotaku, ini disebabkan tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat membuat partisipasi mereka sangat belum memadai.”(Wawamcara dengan ketua Koordinator LKM Tunas Karya Kelurahan Pesisir, tanggal 17 Maret 2017)

Dari hasil wawancara bersama ketua LKM bahwanya masyarakat kurang sadar akan pentingnya proyek yang dilaksanakan itu disebabkan karena pendidikan mereka sehingga pengetahuan nya kurang.

b. Lemahnya Pemahaman Masyarakat. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dari dilaksakannya proyek pambangunan dikawasan rumah mereka, dari beberapa masyarakat mereka tidak tahu maksud dan tujuan dari proyek yang laksanakan dimana pada faktor ini masyarakat hanya menerima keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat sebagai berikut :

“Saya tidak begitu paham mengenai program ini, coba tanya RT biasanya RT

tahu itu. Kami cuman ngikut saja, cuman tahu ada pembangunan ya sampai disitu pemahaman saya, saya tidak begitu tahu tujuan, maksudnya program itu.”(wawancara dengan salah satu masyarakat RT 04 RW 02 Kelurahan Pesisir, tanggal 02 November 2017)

Hasil wawancara diatas menjadi hambatan mereka untuk ikut berpartisipasi, kurangnya pemahaman akan kepentingan pembangunan yang dilaksanakan diwilayah mereka membuat mereka tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan, padahal pemahaman masyarakat tersebut dapat menjadi tambahan untuk menyampaikan ide - ide dan saran dari masyarakat mengenai akan dilaksanakannya proyek pembangunan.

c. Kesibukan Masyarakat Kesibukan masyarakat akan kebutuhan hidup menjadi hambatan dalam ikut berpartisipasi, masyarakat yang tinggal di Kelurahan Pesisir pada umumnya bekerja sebagai pedagang, nelayan dan pegawai. Sehingga untuk mengikut sertakan mereka sangat sulit, sebab masyarakat tidak bisa memilih mana yang harus didahulukan kepentingan perut atau kepentingan bersama. Seperti pernyataan dari hasil wawancara dengan pak RT sebagai berikut :

“Tidak semua masyarakat dapat membantu dalam pelaksanaan tersebut dikarenakan memang masyarakat disini ada yang kerja buruh dan pegawai, disitu pula kita tidak bisa memaksa mereka untuk meminta bantunya.”(wawancara dengan pak RT 04, Kelurahan Pesisir , tanggal 2 November 2017)

Dari hasil wawancara dengan pak RT dapat diketahui bahwa masyarakatnya mempunyai kesibukan masing - masing yang harus diselesaikan

namun ketika ada waktu untuk gotong royong masyarakat masih mau ikut meluangkan waktu untuk menjaga hasil pembangunan.

Kesimpulan

Sesuai dengan pengertian partisipasi masyarakat yakni harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat dengan mendukung pencapaian tujuan melalui proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan evaluasi program. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh terbagi menjadi empat tahap yaitu :

1. **Tahap Pengambilan Keputusan.** Pada tahap ini keterlibatan masyarakat belum optimal, karena masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat - rapat. Sebagian masyarakat masih menjadi penerima hasil dari keputusan yang dibuat.
2. **Tahap Pelaksanaan Program.** Pada tahap ini, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan belum optimal dan menyeluruh dalam pembangunan fisik yang dilaksanakan di Gg. Tanjung Karang, namun sebagian masyarakat sudah memberikan rasa kebersamaan dengan memberikan sumbangan kepada para pekerja berupa makanan sesuai dengan kemampuan mereka.
3. **Tahap Pengambilan Manfaat.** Pada tahap ini, keterlibatan masyarakat dikatakan optimal karena keterlibatan masyarakat sudah menyeluruh dalam

memanfaatkan hasil dari program yang dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini lebih banyak dibandingkan tahap - tahap sebelumnya.

4. **Tahap Evaluasi.** Pada tahap ini, masyarakat belajar untuk mengoptimalkan hasil serta mampu memelihara hasil pembangunan yang berlangsung. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan laporan penanggung jawaban semua kegiatan yang dilakukan, dan pada tahap ini masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyampaian atau memberikan masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Faktor - faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yakni :

a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat.

Masih terdapat masyarakat yang menganggap Program KOTAKU merupakan proyek dari pemerintah sehingga menyebabkan masyarakat kurang untuk ikut berpartisipasi.

b. Lemahnya Pemahaman Masyarakat

Lemahnya pemahaman masyarakat pada saat ditanya maksud dan tujuan proyek pembangunan yang dilaksanakan di wilayah mereka. Dikarena pengetahuan dan pemahaman yang kurang tidak semua warga mendapatkan pendidikan yang cukup

c. Kesibukan Masyarakat

Kesibukan masyarakat yang tidak bisa meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi pada setiap kegiatan dikarenakan pekerjaan mereka padahal kegiatan tersebut akan dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat banyak

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori Dan Implikasinya Di Era Reformasi*. Alfabea : Bandung.
- Anwas, Oos M. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Ardianto, Harun Elvinarto. 2012. *Komunikasi Pembangunan Sosial. RajawaliPers*: Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar - dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utaman
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hetifah, Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governace*. Jakarta: Penerbitan Yayasan Obor Indonesia.
- Isandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan partisipasi berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Press
- Nugroho, Eko. 2008. *Partisipasi Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Andi
- Siagian, Sondang.P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Yayasan obor.
- Soetomo. 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sulistiyani, Ambar, Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model - model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumampouw, Manique. 2004. *“Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif.”*. Jacob Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV. Citra Utama.
- Theresia, Apilia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Trijono, Lambung. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber lain :

Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.
Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru